

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA *BULLYING* (PERUNDUNGAN) TERHADAP PESERTA PEMILU DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE

Syamsul Rizal *

Dr. Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N **

Dr. Indra Gunawan Purba, S.H.M.H ***

Pelaku perundungan terhadap kontestan pemilu pada media massa elektronik biasanya dilakukan dengan memposting gambar atau foto seseorang kontestan pemilu dengan meminimalisir memodifikasi minimal sehingga pembaca masih mudah mengenali korban.

Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial, bagaimana hambatan dan kendala penanggulangan tindak pidana *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial dan upaya mengatasinya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode telaah pustaka (*library research*). Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan tindak pidana *bullying* (perundungan) terhadap peserta pemilu melalui media sosial selain diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mengenai pasal *bullying* di media sosial atau pasal *cyber bullying* dalam bentuk penghinaan, menyerang kehormatan/nama baik seseorang, juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada prinsipnya, menyerang kehormatan/nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perundungan terhadap peserta pemilu adalah aspek kebijakan formulasi/*penal* dan *non penal* yang akan datang sebaiknya perlu ada suatu peningkatan dan perubahan.

Kata Kunci: Peserta Pemilu, Perundungan, Media Sosial

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF PERFORMERS OF THE CRIME OF BULLYING AGAINST ELECTION PARTICIPANTS IN THE MEDIASOCIAL PERSPECTIVE ON ITE LAW

Syamsul Rizal *

Dr. Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N **

Dr. Indra Gunawan Purba, S.H.M.H ***

Perpetrators of bullying against election contestants on electronic mass media are usually carried out by posting a picture or photo of an election contestant with minimal modifications so that readers can still easily recognize the victim.

The problem in this thesis is how to regulate criminal acts related to bullying (bullying) against election participants via social media, what is the criminal responsibility of perpetrators of bullying (bullying) against election participants via social media, what are the obstacles and obstacles to dealing with criminal acts of bullying (bullying) against election participants through social media and efforts to overcome them.

The research carried out was normative research using the library research method. The types of data for this research are primary data and secondary data and are arranged systematically and to examine secondary data using a normative juridical approach and analyzed qualitatively.

Based on the research results, it is known that the regulation of criminal acts of bullying against election participants via social media is not only regulated in the Criminal Code and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code regarding the article on bullying on social media or the article on cyber bullying in the form of insults, attacks on honor/name whether a person, also refers to the provisions of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which in principle, attacking a person's honor/good name is included in the prohibited acts in Article 27A of the Law. Law Number 1 of 2024. An obstacle in overcoming criminal acts of bullying against election participants is that aspects of policy formulation/penal and non-penal in the future should require improvements and changes..

Keywords: Election Participants, Bullying, Social Media.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

KATA PENGANTAR